

Puluhan Tempat Usaha tak Berizin di Danau Sunter Dibongkar

JAKARTA (IM) - Puluhan bangunan tak berizin di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dibongkar petugas gabungan, Selasa (14/9). Bangunan permanen maupun semi permanen ini berlokasi di Jalan Danau Permai Raya.

Dalam penertiban itu mengerahkan sebanyak 208 petugas dari jajaran Satpol PP DKI Jakarta, TNI-Polri, serta unsur terkait lainnya. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, ada sebanyak 21 bangunan tidak berizin yang ditertibkan.

"Ini bangunan-bangunan yang digunakan untuk kafe, restoran, dan lain sebagainya yang berdiri tanpa izin," kata Arifin.

Menurut Arifin pihaknya telah memberikan surat per-

ingatan kepada para pemilik bangunan sejak satu tahun yang lalu. Namun, peringatan itu tidak digubris, dan para pemilik bangunan masih beroperasi di sepanjang Danau Sunter. Sebanyak empat alat berat berjenis ekskavator dikerahkan untuk meratakan bangunan.

Arifin menambahkan, penataan kawasan wisata Danau Sunter memang harus segera dilakukan. Danau Sunter merupakan area resapan air yang berfungsi sebagai pencegahan banjir memasuki musim hujan. "Penataan kawasan Danau Sunter ini memang harus segera dilakukan ya. Kami tahu sebentar lagi masuk musim hujan, jadi 21 bangunan ini akan kami tertibkan keseluruhan," tambah Arifin. ● yan

Pemkot Jaktim Bangun 1.000 Sumur Resapan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Timur membangun 1.000 sumur resapan atau drainase vertikal dengan target setiap kecamatan sebanyak 100 titik guna mengantisipasi banjir saat musim penghujan.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Kusmanto, mengatakan tujuan pembuatan sumur resapan untuk konservasi air tanah, dan mengatasi genangan di wilayah Jakarta Timur.

"Adapun sumur resapan dibangun di pinggir jalan yang biasa tergenang, sehingga bisa mengatasi genangan di lokasi tersebut," kata Kusmanto.

Kusmanto menambahkan sumur resapan itu dibangun sedalam dua meter. Dia mengatakan bahwa keberadaan sumur resapan terbukti mengurangi titik banjir di Jakarta Timur.

Menurut dia, titik banjir di wilayah Jakarta Timur berkurang menjadi 18 titik pada 2021, sedangkan pada 2020 terdapat 25 titik banjir. "Ini terjadi karena adanya sumur resapan di sepanjang Jalan DI. Panjaitan sebanyak 42 titik," ujar Kusmanto, Selasa (14/9).

Kusmanto mengatakan pembuatan sumur resapan harus tersebar di titik rawan genangan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mengatasi banjir. Dia juga berharap, sumur resapan lainnya yang dibangun dari Dinas SDA DKI Jakarta sebanyak 2.000 titik bisa selesai pada akhir Desember 2021.

"Saya mengharapakan Camat, Lurah, Satpel Dinas SDA, agar dalam membangun sumur resapan tepat sasaran, jangan sampai di satu titik berlebihan, titik lain yang malah dibutuhkan tidak ada," ujar Kusmanto. ● yan

Pembak Bekasi Diganjar Penghargaan Kemenkeu RI Atas Raihan Opini WTP



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Selasa (14/9).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 5 Kali Berturut-turut.

Penghargaan itu diberikan dalam Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan, Pj. Sekretaris Daerah Herman Hanapi, beserta Kepala SKPD terkait di Command Center Gedung Diskominfosantik Cikarang Pusat, Selasa (14/9).

Pj. Bupati Dani menyampaikan apresiasi kepada para Bupati pendahulunya dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bekasi yang telah memberikan kontribusi dalam meraih Laporan Hasil Keuangan Opini WTP.

"Apresiasi ini diberikan kepada Bupati terdahulu saya atas perjuangannya dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sampai saat ini pun baik Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Camat masih terus ikut serta memberikan kontribusinya," tuturnya dalam rilis

Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (14/9).

Dengan pencapaian WTP 7 kali berturut-turut, Dani berpesan agar Kepala Perangkat Daerah dapat memertahankan Raihan Opini WTP setiap tahunnya, sehingga nantinya bisa memperoleh kategori Penghargaan WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut.

"Pemkab Bekasi memang sudah dapat WTP 7 kali berturut-turut, oleh karena itu mulai sekarang kita harus mempunyai semangat tinggi agar dapat meraih kategori penghargaan yang 10 kali berturut-turut. Jangan sampai terlewat tidak dapat WTP," ucapnya.

Untuk meraih itu, dirinya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Bekasi secara berkala, terutama pada Kualitas Laporan Keuangan serta Kualitas Laporan Aset yang masih harus diperbaiki.

"Yang sudah baik akan dipertahankan, sedangkan yang masih harus ditingkatkan adalah Kualitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Aset. Saya akan tingkatan intensitas pemeriksaan laporan tersebut secara berkala, tidak hanya di akhir tahun saja," imbuhnya mengakhiri. ● mdl

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi) ("Perseroan") telah selesai berdasarkan keputusan RUPS. RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan membebaskan Likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses likuidasi. Sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 15 September 2021

Likuidator PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi)

4 Metropolis

IDN/ANTARA



KEBAKARAN RUKO DI GLODOK

Petugas pemadam kebakaran berjalan usai memadamkan api yang membakar ruko di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (14/9). Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia dalam kebakaran yang penyebabnya masih diteliti pihak berwenang.

JADWAL PEMBUKAAN 1.500 SEKOLAH MASIH BISA BERUBAH

DKI Belum Putuskan PTM Terbatas Dilaksanakan Setiap Hari

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memang memiliki rencana agar PTM nantinya dibuka setiap hari sehingga anak-anak bisa mengikuti PTM 2 kali dalam seminggu. Namun, saat ini, fokus Disdik DKI adalah memantau dan terus mengevaluasi 610 yang sedang melakukan PTM sejak 30 Agustus yang lalu.

JAKARTA (IM) - Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan, pihaknya belum memutuskan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah di Jakarta dilakukan setiap hari. Saat ini, kata Taga, PTM terbatas

terjadi dilakukan 3 hari, yakni Senin, Rabu, dan Jumat dalam sepekan.

"Belum difinalkan soal kegiatan PTM setiap hari ini, masih tiga kali dalam seminggu, Senin, Rabu dan Jumat," ujar Taga kepada wartawan, Selasa (14/9).

Taga mengatakan, Dinas

Pendidikan DKI Jakarta memang memiliki rencana agar PTM nantinya dibuka setiap hari sehingga anak-anak bisa mengikuti PTM 2 kali dalam seminggu. Namun, kata dia, saat ini, fokus Disdik DKI adalah memantau dan terus mengevaluasi 610 yang sedang melakukan PTM sejak 30 Agustus yang lalu.

"Memang saat ini kami sedang pendalaman, mencoba kita pendampingan kepada 610 sekolah ini agar kita tidak gegabah merelakan 5 hari, tetapi ternyata berefek kepada jumlah klaster," kata dia.

Lebih lanjut, Taga mengatakan, pihaknya terus memastikan 610 sekolah yang sedang menjalankan PTM terbatas tidak melakukan pelanggaran protokol kes-

ehatan. Termasuk, tutur dia, memastikan apakah ada siswa yang mengikuti PTM terpapar Covid-19.

"Fokus kita ke 610 yang sudah melaksanakan PTM, sekarang sedang dipantau adakah pelanggaran protokol kesehatan, adakah ada yang terpapar Covid-19. Tapi sementara sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Pokoknya kita sedang pendalaman dan pendampingan terus menerus," kata Taga.

Bisa Berubah

Taga Radja Gah, mengatakan, jadwal pembukaan 1.500 sekolah jika sesuai jadwal memang direncanakan pada 27 September nanti. Namun demikian, menurutnya, hingga kini masih dalam proses finalisasi dan perapihan untuk menentukan sisa 890 sekolah yang akan dibuka.

"Iya time line-nya memang demikian. Tapi kan kita belum tahu, mengenai pelatihan (juga) bisa saja berubah," ujar Taga.

Dia menambahkan, pembukaan sisa sekolah itu,

ditetapkan setelah melakukan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan Disdik DKI.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, pembelajaran tatap muka di DKI sejauh ini dipandang fraksi berjalan lancar. Dia mengaku, selama pengamatan ke lima wilayah DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang sangat berarti.

"Tapi mungkin ada 1-2 pelanggaran ya, yang hanya saat itu diturunkan maskernya. Tapi umumnya kesiapan prosesnya, tempat cuci tangannya atau proses pembubarannya itu berjalan lancar ya," ujar Iman saat ditemui di DPRD DKI, Senin (13/9).

Kendati demikian, dia menyebut bahwa hal itu masih bisa ditingkatkan lebih baik. Menyoal penambahan sekolah ke depannya, dia mengaku harus tetap mengacu pada kebijakan pemerintah dan status PPKM yang ada.

"Nanti persentasenya bagaimana. Kita juga harus mengacu pada Kementerian," ungkap dia. ● yan

Pembangunan Proyek DPUPR Rusak Fasilitas Telekomunikasi di Depok

DEPOK (IM) - Pembangunan Proyek Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, merusak fasilitas telekomunikasi. Akibat pengerjaan yang sembrono itu, sejumlah pemerintahan dan ribuan warga tak bisa mengakses internet.

Pembangunan proyek perbaikan jalan dan jembatan ambias di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), tak jauh dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok itu, dilakukan oleh kontraktor PT Maga Seribu Perkasa (MSP), mitranya dari DPUPR.

Teknisi PT. Telekomunikasi (Telkom) Kota Depok, Asep menuturkan, fasilitas telekomunikasi yang rusak berupa kabel-kabel yang berada di bawah proyek jalan dan jembatan. "Rusaknya kabel-kabel di sana akibat pengerukan proyek Bina Marga DPUPR. Mengeruknya terlalu dalam dengan menggunakan mesin," ujar Asep, Selasa (14/9).

Dia menyayangkan, akibat ketidak hati-hatian pelaksana proyek mengakibatkan keru-

sakan kabel telekomunikasi. Imbasnya para pelanggan Telkom, di sejumlah instansi pemerintahan yang berada di Jalan Boulevard, Komplek Perkantoran GDC maupun permukiman warga di sekitar lokasi tidak dapat mengakses internet.

Rusaknya jaringan kabel tersebut, jelas Asep, telah terjadi sejak tiga hari lalu. "Kerusakan kabel telekomunikasi (internet) dari hari Minggu (12/9) malam sampai sekarang belum pulih," ujarnya.

Terkait masalah ini, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Depok, Artanto menolak dikonfirmasi. Artanto yang dihubungi wartawan tak mau berkomentar. Bukan kali pertama ini, Artanto menghindari dari wartawan yang ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi temuan di lapangan. Ketika kasus perbaikan jalan rusak sepanjang 5 kilometer lebar 6 meter di Komplek GDC tahun 2020 senilai Rp40 miliar, Artanto tidak mau berkomentar.

Hal senada dilakukan, Sekretaris DPUPR Kota Depok, yang juga pelaksana tugas

Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti. Pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp tak dijawabnya. Citra hanya mengirimkan dua buah foto jalan dan jembatan yang tengah dikerjakan mitranya PT. MSP, melalui whatsapp tanpa keterangan.

Pelaksana perbaikan jalan dan jembatan GDC yakni PT MSP, konsultan supervisi PT Reka Cipta Kreasindo (RCK), maupun konsultan pengawas PT Karya Mandiri Konsultan (KMK) sampai berita ini diturunkan menurut stafnya, tidak di tempat.

Untuk diketahui, rusaknya kabel telekomunikasi membuat satuan pemerintahan (Pengadilan, Kejaksaan, DPRD, Imigrasi dan lain-lain) yang berada di Komplek Perkantoran GDC Kota Depok kesulitan mengakses internet. Apalagi situasi sekarang masih keadaan pandemi covid-19 yang mengutamakan internet untuk berkomunikasi.

Pelayanan publik dan persidangan pengadilan tidak dilakukan secara tatap muka, namun secara online atau virtual. ● yan

TMII Uji Coba Pembukaan untuk Umum Mulai Jumat

JAKARTA (IM) - Humas Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Adi Widodo, mengatakan, pihaknya akan melakukan uji coba pembukaan TMII pada Jumat (17/9). Hal itu dilakukan, setelah proses penilaian CHSE dari Kemendikbud selesai dilakukan hingga Kamis (16/9).

"TMII sudah memiliki sertifikat tersebut dan saat ini sudah saatnya dievaluasi, karena tiap tahun harus diperpanjang," ujar Adi kepada awak media, Selasa (14/9).

Dalam pelaksanaannya, kata dia, syarat memasuki TMII diharuskan mematuhi protokol kesehatan (prokes) lengkap. Utamanya, dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan minimal sudah mendapatkan dosis vaksin pertama.

"Kapasitas yang diijinkan

juga 25 persen, hingga dapat menampung 15 ribu pengunjung," lanjut Adi.

Khusus untuk wahana yang bisa dikunjungi, lanjut dia, masih menunggu QR code di masing-masing lokasi. Sedangkan untuk QR code di gerbang masuk dan keluar, dikatakannya sudah diperoleh.

"Untuk wahana yang dibuka saat ini taman burung, taman reptilian komodo, dan kereta gantung," tuturnya.

Sedangkan untuk anjungan daerah, menurut dia, hanya dibuka sebatas halaman. Berbeda dengan rumah adat yang masih ditutup. "Sampai tanggal 16 september, TMII dibuka khusus untuk kegiatan olahraga," ungkap dia.

Terkait tiket masuk, menurut dia, bisa dipesan langsung, daring, atau di loket dengan tunai maupun non-tunai. ● yan

P2APBD 2020 Disetujui, Pemkab Bekasi Bersiap Susun APBD Perubahan

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersiap untuk menyusun APBD perubahan, setelah sebelumnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2020 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, setelah menghadiri rapat Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang P2APBD 2020 di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (13/9).

Kegiatan tersebut turut di-

hadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Herman Hanapi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodrattullah, serta masing-masing Ketua Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Bekasi.

Saat diwawancarai, Pj. Bupati Dani menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi akan langsung mempersiapkan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk dapat menyusun

PENGUMUMAN

Direksi PT Prosecur Cash Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan penerbitan saham baru Perseroan dengan mengkonversi pinjaman Perseroan dari Prosecur Global Cit Row, S.L., dan PT Ekanusa Yamasela Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 15 September 2021
Direksi PT Prosecur Cash Indonesia

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panacea Natural Sciences Indonesia (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2021, nomor 32, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Neraca Akhir Likuidasi Perseroan;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pertanggungjawaban Likuidator Perseroan;
3. Menyetujui memberhentikan dan membebaskan Likuidator Perseroan;
4. Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium kepada Likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:

Bp. Soenoe Soewardono
di Puri Matari 1 Lantai UG
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. H1-H2
Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, 15 September 2021
Likuidator



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kanan depan) dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodrattullah (kiri depan) saat Rapat Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang P2APBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (13/9).

APBD Perubahan agar dapat segera disepakati.

"Setelah P2APBD sudah ditandatangani, kita sudah dapat perhitungan untuk Silpa (Sisa Lebih Pagu Anggaran) tahun 2020, sehingga akan langsung disiapkan dengan penyampaian KUA-PPS agar APBD perubahan bisa kita sepakati," sebutnya dalam rilis Prokopim Setdakab

Bekasi, Selasa (14/9).

Dani berharap nantinya APBD perubahan dapat segera disepakati bersama agar Pemkab Bekasi dapat berfokus untuk menyelesaikan program kegiatannya. Setelah itu, dirinya akan berfokus untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

"Harapannya dengan

waktu yang tidak lama dapat disepakati bersama, sehingga masih tersedia waktu yang leluasa untuk kita menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tersisa. Dan agenda berikutnya sudah menunggu yaitu penyusunan KUA-PPAS untuk APBD murni di Tahun Anggaran 2022," tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil P2APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut dikarenakan Pemkab Bekasi sudah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dari P2APBD ini sudah tidak ada catatan, karena sudah diaudit oleh BPK dan kita mendapatkan hasil opini WTP, sehingga tidak ada permasalahan," ucapnya.

Sebagai informasi, P2APBD Tahun Anggaran 2020 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (27/8) malam dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. ● mdl